

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Oleh:

Pandapotan Ritonga¹ Zulham Afandi Saragi²

Program Studi, Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}

Email: pandapotanritonga@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine village fund management and assess the financial performance of Bandar Klippa Village using the "value for money" method as a performance indicator. A descriptive method was employed, utilizing data from the Village Budget (APBDes) realization reports for the years 2017–2021. The results indicate that village fund management in Bandar Klippa Village (Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency) complies with Ministry of Home Affairs regulations, although there were delays in reporting APBDes implementation to the Regent. Regarding the value-for-money method, the economy ratio fell into the "economical" category; however, the efficiency ratio was classified as "uneconomical" because realized expenditures exceeded received revenues. Finally, the effectiveness ratio was classified as "effective," as it maintained a 100% rate over the five-year period, demonstrating the village government's success in meeting planned revenue realization targets

Keyword : Management, Village Fund, financial performance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Bastian (2006), menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektivitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja (Wenny 2012). Efektivitas dan Efisiensi kinerja keuangan desa ditentukan dari pengelolaan keuangan desa tersebut apabila pengelolaannya baik maka akan berdampak terhadap kinerja keuangannya. Efisiensi kinerja keuangan desa ini dapat menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, sedangkan Efektivitas kinerja keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dan mengelola dana desa tersebut. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa fenomena yang terjadi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa seperti target penggunaan dana yang belum terealisasi dengan baik, ini membuat kurang efektifnya pengelolaan dana desanya, seperti halnya pada tahun 2019 dalam penyampaian pelaporan APBDes terlambat disampaikan kepada Bupati/Walikota yang disebabkan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam penyusunan laporan keuangan desa seperti terlambat memasukkan bukti – bukti atau dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan (Jatmiko,2014).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan pada pihak – pihak yang membutuhkan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah – masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan pembuatan laporan yang bisa di usahakan secepat – cepatnya di buat dan disampaikan (Jatmiko,2014), dan hal ini juga sesuai dengan salah satu asas pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu tertib dan disiplin anggaran. Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bandar Klippa saat penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa yaitu saat penyampain laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes mengalami keterlambatan. Yang mengakibatkan Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan dana desa selesai

KAJIAN TEORI

Kinerja Keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut (Bastian, 2010). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, yang ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi (Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N.:2018). .

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (caro, 2015). Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lain.

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban.

Value for Money

Menurut Mardiasmo (2009: 4) value fot money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Salah satu tuntutan hidup terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap value for money dalam aktivitas organisasi sector publik. Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Ritonga P, 2021:32).

1. Rasio Ekonomis

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

Rumus rasio ekonomis daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mamudi (2015) dapat digunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Ekonomis

Persentase Nilai Kenirja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

2. Rasio Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan dengan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Rasio efisiensi dirumuskan dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

3. Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

Presentasi Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Bagian ini memuat teori atau konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian. Teknik penulisan sitasi dari teori atau konsep yang digunakan adalah menggunakan *APA style*, yaitu dengan menampilkan nama belakang pengarang dan tahun terbit. Setiap sitasi yang digunakan harus tertuang dalam daftar pustaka. Dalam tulisan, diperkenankan menggunakan tabel dan gambar.

METODE→ *Heading Level 1 (12 pts)*

deskriptif untuk
mencari unsur-
unsur, ciri-
ciri, sifat-
sifat suatu
fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data
dan menginterpretasikannya.
Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus dan analisis documenter yaitu mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017-2021

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus dan analisis documenter yaitu mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017-2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa yang ada pada desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri yang dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan dalam proses pengelolaan pemerintah desa juga sudah turut dalam melibatkan masyarakat karena pemerintah desa memahami konsep dari pengelolaan dana desa diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun pada pelaksanaannya terjadinya keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan terlambatnya pemerintah desa dalam memasukkan bukti-bukti.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Value for Money

1. Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomis	Kategori
2017	2.098.974.198,00	1.950.801.253,00	92,94%	Ekonomis
2018	2.306.422.712,00	2.185.010.925,00	94,73%	Ekonomis
2019	1.940.259.996,00	1.801.998.893,00	76,72 %	Kurang Ekonomis
2020	1.971.953.819,00	1.946.660.800,00	98,71 %	Ekonomis
2021	2.067.889.391,00	2.030.919.107,00	98,21 %	Ekonomis

Data Diolah 2022

Pada rasio ekonomis kinerja keuangan Desa Bandar Klippa yang diukur selama 5 tahun terakhir, dimana untuk rasio ekonomis pada tahun 2017 sebesar 92,94%, yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 100%, begitu juga untuk tahun 2018 rasio ekonomis terjadi peningkatan sebesar 94,73%, yang masih termasuk dalam kategori ekonomis karena yaitu berada diantara 100% - keatas, untuk tahun 2019 sebesar 76,72%, yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya dan termasuk kedalam kategori kurang ekonomis karena berada pada 60%-80%, pada tahun 2020 rasio ekonomis terjadi peningkatan menjadi sebesar 98,71%, yang termasuk kategori ekonomis karena berada diantara 100% keatas, untuk tahun 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 98,21% , yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% dan 100%. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semakin besar presentase ekonomis maka kinerja keuangan maka akan semakin baik (Mahsun, 2016). Dan rasio ekonomis yang ada pada desa Bandar Klippa sudah dapat dikategorikan ekonomis rasio keuangannya.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kategori
2017	1.950.801.253,00	1.984.582.000,00	98,29%	Kurang Efisiensi
2018	2.306.422.712,00	2.161.160.734,00	106%	Tidak Efisiensi
2019	1.804.872.475,00	1.818.872.475,00	100%	Kurang Efisiensi
2020	1.971.953.819,00	1.924.628.164,00	102 %	Tidak Efisiensi
2021	2.067.889.391,00	2.039.148.330,00	101 %	Tidak Efisiensi

Data Diolah 2022

Pada rasio efisiensi untuk belanja Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada tahun 2017 sebesar 98,29% yang termasuk dalam kategori kurang efisien

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

karena berada dibawah 100%, untuk tahun 2018 rasio efisiensi terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 106%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 100%, yang termasuk kedalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% - 100%, pada tahun 2020 rasio efisiensi terjadi penurunan menjadi sebesar 102% yang tetap termasuk kedalam kategori tidak efisien karena masih berada diatas 100% keatas, untuk tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 101%, yang termasuk kedalam kategori masih tidak efisien karena berada diatas 100%., rasio efisiensi yang ada pada desa Bandar Klippa masih berada dalam kategori kurang efesien rasio keuangannya.

Penyebab masuknya rasio efisiensi ini kedalam kategori kurang efisien dikaenakan adanya nilai realisasi belanja yang tidak berbanding dengan realisasi pendapatan. Sehingga realisasi belanja dana desa yang ada lebih besar dari pendapatan yang terealisasi hal ini menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah dikeluarkan.

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kategori
2017	1.984.582.000,00	1.984.582.000,00	100%	Efektif
2018	2.161.160.734,00	2.158.249.767,00	100%	Efektif
2019	1.801.872.475,00	1.818.785.709,00	99,23 %	Efektif
2020	1.924.628.164,00	1.919.021.735,00	100 %	Efektif
2021	2.039.148.330,00	2.037.121.000,00	100 %	Efektif

Data Diolah 2022

Rasio efektivitas kinerja keuangan desa Bandar Klippa selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, untuk tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada pada 100%, sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas masih konsisten yaitu sebesar 100 karena berada di 100%, untuk tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,23%, tetapi masih dikategorikan efektif karena berada diantar 90%-100%, untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 100% , yang termasuk kedalam kategori efektif karena berada diantara 90% dan 100%, untuk tahun 2021 rasio efektif masih mempertahankan keefektifannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% dan 100%.

Pengukuran kinerja keuangan yang ada pada desa Bandar Klippa dengan menggunakan metode *value for money* sudah termasuk kedalam kategori efektif dengan presentase 100% ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa sudah dikatakan baik

Diskusi

Untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif ditahun anggran yang akan datang maka pemerintah desa Bandar Klippa agar terfokus dalam memperbaiki kinerja keuangannya dengan menggunakan rasio ekonomis dan efisiensi sebagai

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

acuan, agar dalam proses pelaksanaan tahun anggaran belanja dapat berjalan baik dan benar sehingga meminimalkan anggaran yang bersisa dan memaksimalkan realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan agar sesuai dengan yang direncanakan

KESIMPULAN

Pada rasio efisiensi Pemerintah desa Bandar Klippa berada pada kategori tidak efisien dengan presentase lebih dari 100% . Penyebab masuknya rasio efisiensi ini kedalam kategori kurang efisien dikarenakan adanya nilai realisasi belanja yang tidak berbanding dengan realisasi pendapatan. Sehingga realisasi belanja dana desa yang ada lebih besar dari pendapatan yang terealisasi dan rasio efektivitas berada pada kategori yang cukup efektif dengan presentasi 100%, % ini menunjukkan bahwa target realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya

REFERENSI

- Abu Masihad. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa: Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa
- Eka Nurmala Sari, Heny Triastuti K. Y. E. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan Perdana Publishing *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintahan Kota Medan*. Skripsi (Vol. 53). Retrieved from file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis value for money 2020.pdf Skripsi (Vol. 53). Retrieved from file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis value for money 2020.pdf (Vol. 53). Retrieved from file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis value for money 2020.pdf *Analisis Value For money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintahan Kota Medan*. Skripsi (Vol. 53). Retrieved from file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis value for money 2020.pdf
- Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan D
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 1–23.
- Husnaeni Husain. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makassar. Unimuh Makassar. Ilmu Manajemen.
- Indrawati, S. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Erlangga.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 94.- 101

- Jatmiko, U. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Udik Jatmiko. 113.
- Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, hal 20(2), 217-223.
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali-Indonesia Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara . *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.
- Ritonga, Pandapotan. (2021). Keuangan Negara. Medan: Penerbit Umsu Press
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma*, 11(3), 323. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- S. Lesmana, A. Ikhsan. (2018). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Penerbit Manadenatera-ISBN 978-602-5470-04-02
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, hal 2(4), 93-106.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1)